

MILIK PERPUSTAKAAN
PPS MAGISTER ADM. PUBLIK UMA

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
TENTANG PELIMPAHAN SEBAHAGIAN KEWENANGAN TUGAS
PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA KECAMATAN**

T E S I S



Oleh :

SYAFRULLAH

NPM. 021801036

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N**

2004

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
TENTANG PELIMPAHAN SEBAHAGIAN KEWENANGAN TUGAS
PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA KECAMATAN**

T E S I S

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik
Pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik



Oleh :

SYAFRULLAH

NPM. 021801036

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N**

2004

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA

PALAMAN PERSETUJUAN

Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan oleh :

Nama : SYAFRULLAH
N I M : 021801036
PROGRAM : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
JUDUL : Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Deli
Serdang Tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan
Pemerintahan Kabupaten Kepada Camat

Pembimbing I,

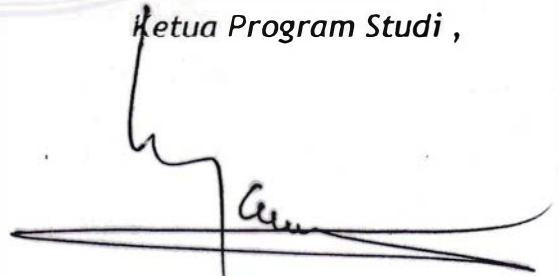
Pembimbing ii,

Drs. Amru Nasution, M.Kes

Drs. Kariono, MA

Direktur,

Ketua Program Studi ,



Drs. Heri Kusmanto, MA

Drs. Usman Tarigan, MS

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini dipertahankan di depan Panitia Penguji Tesis

Program Pascasarjana
Magister Administraasi Publik
Universitas Medan Area

Pada hari :
Tanggal : Oktober 2004
Tempat : Program Pascasarjana MAP-UMA

TIM PENGUJI

Ketua	: Drs. Usman Tarigan, MS	(.....)
Sekretaris	: Taufik Siregar, SH, M. Hum	(.....)
Anggota I	: Drs. Amru Nasution, M.Kes	(.....)
Anggota II	: Drs. Kariono, MA	(.....)
Penguji Tamu	: Drs. Heri Kusmanto, MA	(.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Adapun judul Tesis ini adalah "Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kepada Camat".

Penulisan tesis ini dapat diselesaikan atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

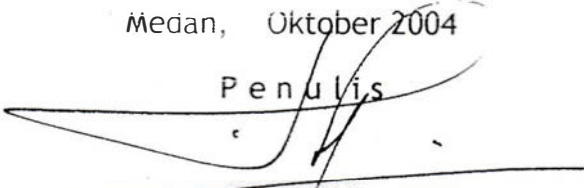
1. Bapak Ir. Zulkarnaen Lubis, MS, Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Drs. Heri Kumanto, MA, Direktur PPs Magister Administrasi Publik,
3. Bapak Drs. Usman Tarigan, MS, Ketua Program Studi MAP
4. Bapak Drs. Amru Nasution M.Kes, sebagai Pembimbing I.
5. Bapak Drs. Kariono, MA, Pembantu Direktur I Bidang Akademik, sekaligus sebagai Pembimbing II
6. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar PPs Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini.

Terimakasih pula kepada kedua orang tua, istri dan anak-anak tercinta beserta seluruh keluarga, yang tidak pernah putus mengalirkan doa dan memompakan semangat demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Semoga amal sholeh mereka semua mendapat tau'ik dan rahmat Allah
Subhanahu wataala, Amin Ya Rabbal Alamın.

Medan, Oktober 2004

Penulis


Syafrullah



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAKSI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Kerangka Pemikiran	7
1.6. Sistem Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kebijakan Publik	11
2.2. Implementasi Kebijakan	13
2.3. Pola Penuelegasian Kewenangan Pemerintahan Kecamatan	20
2.4. Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 850 Tahun 2001 Tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati Kepada Camat di Lingkngga Pemerintah Kabupaten Deli serdang.....	24
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Metode Penelitian	48
3.2. Lokasi Penelitian	49

3.3. Populasi dan Sampel	49
3.4. Teknik Pengumpulan Data dan pengukuanya.....	49
3.5. Operasionalisasi Variabel.....	51
3.6. Teknik Analisis Data	52
BAB IV : GAMBARAN UMUM KOTA BINJAI	
4.1. Keadaan Geografis	54
4.2. Keadaan Demografi	56
4.3. Keuangan Daerah	58
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	
5.1. Hasil Penelitian.....	61
5.1.1. Karakteristik Responden	61
5.1.2. Variabel Penelitian	64
5.2. Analisis Data	78
5.2.1. implementasi Kebijakan	78
5.2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi implementasi Kebijakan.....	80
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Kesimpulan.....	83
6.2. Saran - Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
L A M P I R A N	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehadiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan tonggak baru dalam hubungan Pusat dan Daerah. Disebut demikian karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memiliki filosofi dan paradigma yang berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya. Apabila Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah menggunakan filosofi “keseragaman dalam kesatuan”, maka dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menggunakan filosofi keanekaragaman dalam kesatuan” (Wasistion, 2002:26).

Sebagai konsekuensi logis dari perubahan filosofi di atas, daerah memiliki kebebasan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Daerah, termasuk dalam pengaturan kelembagaan. Pola otonomi yang digunakan juga berubah dari pola simetris ke pola asimetris. Artinya isi dan bentuk otonomi daerah yang satu dengan yang lainnya dapat berbeda - beda. Hal ini nampak dari adanya otonomi khusus bagi Aceh dan Papua.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menawarkan perubahan fungsi utama pemerintah daerah, yang semula sebagai promotor pembangunan menjadi pelayanan masyarakat. Perubahan

tersebut dengan sendirinya akan mengubah bentuk, susunan, kedudukan dan fungsi kelembagaan pemerintah daerah baik unsure staf, unsure lini teknis, unsure lembaga teknis maupun unsure lini ke wilayah.

Selain perubahan pada tataran filosofis, pola dan fungsi utama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah juga menawarkan beberapa paradigma baru antara lain kedaulatan rakyat, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat serta pemerataan keadilan. Melalui perubahan paradigma tersebut, peran eksekutif yang dominant selama ini (*executive heavy*) digeser menjadi dominasi legislative (*legislative heavy*). Hal ini terlihat dari pasal-pasal di dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut menempatkan bab DPRD berada di depan bab Kepala Daerah. Selain itu, pengatur kedudukan, kewenangan serta hak DPRD juga memperlihatkan penguatan posisi tersebut. Dilihat dari penjelasan system Pemerintah Daerah kedua sisi kutub semacam ini tidak sehat untuk kehidupan masyarakat yang demokratis. Di dalam masyarakat yang demokratis pembagian kekuasaan menghendaki adanya prinsip "check and balance" artinya ada pembagian kekuasaan dan fungsi yang jelas dan berimbang antara eksekutif, legislative serta yudikatif. Pergeseran dominasi tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan dan telah berpengaruh terhadap jalannya Pemerintahan Daerah termasuk pada tingkat Pemerintahan Kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N., 1999, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R., 1995, *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall.
- Edward III, 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarter Press.
- Gibson, James L. *Organisasi dan Manajemen*, Penerbit Erlangga. Jakarta. 1990
- Grindle, Merilee S., (ed), 1980, *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, new jersey: Princetown University Press.
- Handyaningrat, Soewarno, 1993. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: GunungAgung.
- Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika..
- Jones, Charles O., 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manila, I GK, 1996. *Praktek Manajemn Pemerintahan Dalam Negeri*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975, "*The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework* dalam *Administration and Society* 6, 1975, London: Sage.
- Nugroho D, Riant, 2003. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Osborne, David, dan Ted Gaebler, 1993, *Reinventing Government: How the Enterpreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, New York: Plume Book.
- Republk Indonesia, 1999. *Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta : CV. Tamita Utama.
- Sugiyono, 1998. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.

- Tjokroamidjojo, Bintoro, "Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan", Jakarta, 20 Juni 2000, *kertas kerja*.
- Toha, Miftah, 1991 (1987), *Perspektif Perilaku Birokrasi*, Jakarta: Rajawali.
- Turner, Mark, dan David Huime, 1997, *Governance, Administration, and Development*, London: MacMillan Press, 1997.
- Wahab, Solichin Abdul, 2002, *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Waistiono, Sadu, dkk, 2002. *Menata Ulang Kelembagaan Pemerintahan Kecamatan*. Jakarta : Pusat Kajian Pemerintahan STPDN bekerjasama dengan Citra Pindo.
- Waistiono, Sadu, 2002. *Kapita Selekta Penyeienggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Pusat Kajian Pemerintahan STPDN bekerjasama dengan Citra Pindo.
- Wibawa, Samudra, 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada,